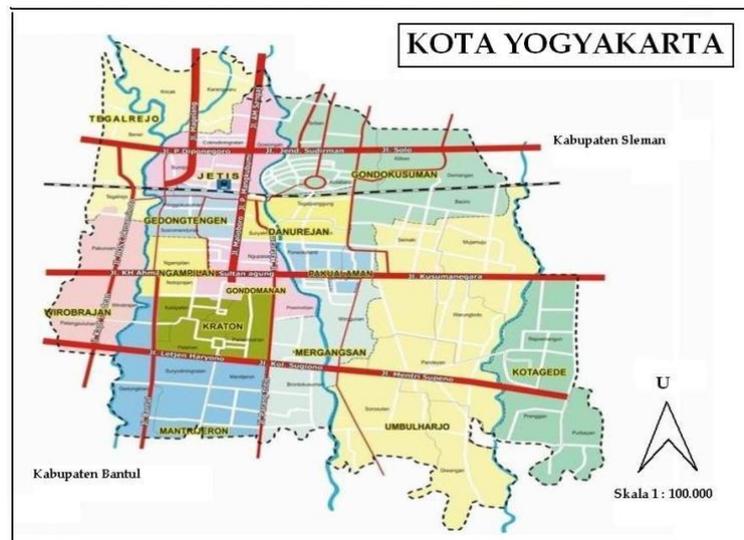


BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kota Yogyakarta



Kota Yogyakarta tidak terlepas dari sejarah masa lalu di mana berawal dari sebuah kerajaan. Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan oleh pangeran Mangkubumi atau kerap dikenal sebagai ‘Sultan Hamengkubuwana I’ tepatnya pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Ngayogyakarta merupakan daerah administratif dalam bentuk kerajaan yang ada dari hasil perjanjian “Giyanti”. Isi dari perjanjian tersebut adalah kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, di mana separuh bagian merupakan hak milik kerajaan Surakarta dan setengah bagiannya merupakan hak milik Pangeran Mangkubumi.

Adapun Daerah kekuasaannya pada waktu itu meliputi Mataram atau Yogyakarta, Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan,

Kartosuro, Kalanbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, dan Grobongan. Dengan adanya perjanjian “Giyanti” maka secara langsung Pangeran Mangkubumi atau yang kerap dikenal dengan Sultan Hamengkubuwana menetapkan secara langsung daerah kekuasaannya tersebut sebagai Ngayogyakarta (Yogyakarta) dengan pusat pemerintahan atau ibu kota di Yogyakarta.

Adapun pembangunan keraton Ngayogyakarta dibangun sekaligus diawasi oleh Sultan Hamengkubuwana saat itu. Seiring dengan waktu Ngayogyakarta tumbuh menjadi kota budaya dengan kearifan kesenian Jawa. Seni yang menjadi sentral dari keberadaan kota Ngayogyakarta tidak hanya Sultan yang memimpin. Segala bentuk kesenian yang hadir di tengah-tengah masyarakat merupakan wujud dari tradisi kerajaan atau keraton yang kemudian berkembang di masyarakat umum, walaupun ada beberapa tradisi yang hingga saat ini tetap dijaga hanya dalam lingkup kerajaan saja.

Setelah Indonesia merdeka tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Ngayogyakarta memutuskan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendapatkan penghargaan sebagai salah satu daerah istimewa. Di mana pada saat itu Sri Sultan Hamengkubuwana IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII mendapatkan piagam penghargaan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18. Tepatnya pada tanggal 30 Oktober secara resmi pemerintahan Daerah Istimewa

Yogyakarta dijalankan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur beserta Badan Pekerja Komite Nasional.

Awal adanya hak otonom dalam menjalankan daerah administratif pada saat itu penuh dengan perundingan di mana anggota Dewan Legislatif pada saat itu juga turut menjadi personal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pertama kali dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang Dewan kehormatan. Berdasarkan Tap MPRS Nomor XII/MPRS/1966 Kota Yogyakarta merupakan daerah tingkan II yang dipimpin Walikota Kotamadya yaitu kepala daerah tingkat II.

Adanya era reformasi di Indonesia menyebabkan pemerintahan harus dijalankan secara otonom seiring dengan tuntutan pemerintah yang baik atau *Good Governance* maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 di mana dalam keputusan tersebut sebutan Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan pemerintahannya disebut pemerintahan kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebaga Kepala Daerah.

B. Geografis Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta merupakan daerah administrasi Kota dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun Visi dari Kota Yogyakarta adalah “mewujudkan kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”.

Visi tersebut diiring dengan tujuh misi pendukung guna mencapai kesejahteraan masyarakat kota Yogyakarta.

1. Luas Wilayah

Kota Yogyakarta memiliki luas mencapai 32,5 km² yang terbentang antara 110°24'19'' hingga 110°28'53'' Bujur Timur dan 7°15'24'' hingga 7°49'26'' Lintang Selatan dengan rata-rata ketinggian 114 m diatas permukaan air laut. Adapun rincian wilayah Kota Yogyakarta sebagai berikut :

Tabel 2.1
Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan Luas Kecamatan

No	Kecamatan	Luar Area (km ²)	Presentase
1	Mantrijeron	2.61	8
2	Kraton	1.4	4.3
3	Mergansan	2.31	7.1
4	Umbulharjo	8.12	25
5	Kotagede	3.07	9.4
6	Gondokusuman	3.97	12.2
7	Danurejan	1.1	3.4
8	Pakualaman	0.63	1.9
9	Gondomanan	1.12	3.4
10	Ngampilan	0.82	2.5
11	Wirobrajan	1.76	5.4
12	Gedongtengen	0.96	3
13	Jetis	1.72	5.3
14	Tegalrejo	2.91	9
Total		32.5	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta 2016

2. Batas Wilayah

Kota Yogyakarta merupakan Ibukota dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah tingkat II yang berstatus kota diantara empat

daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Adapun batas wilayah Kota Yogyakarta meliputi ;

1. Bagian Utara : Kabupaten Sleman
2. Bagian Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman
3. Bagian Selatan : Kabupaten Bantul
4. Bagian Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

3. Jumlah penduduk

Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk sebesar 412.437 jiwa, dengan jumlah total laki-laki dan perempuan mencapai 412.437 jiwa. Berikut table jumlah penduduk kota Yogyakarta :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin Di Kota Yogyakarta
Tahun 2018

No	Nama kecamatan	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Mantrijeron	17.275	18.089	35.364
2	Kraton	10.722	11.298	22.02
3	Mergansan	15.523	16.533	32.056
4	Umbulharjo	33.983	35.276	69.259
5	Kotagede	16.592	17.125	33.717
6	Gondokusuman	20.467	21.798	42.265
7	Danurejan	10.345	10.819	21.164
8	Pakualaman	5.14	5.608	10.748
9	Gondomanan	7.338	7.731	15.069
10	Ngampilan	9.103	9.473	18.576
11	Wirobrajan	13.517	14.279	27.796
12	Gedongtengen	9.837	10.289	20.126
13	Jetis	13.213	14.046	27.259
14	Tegalrejo	18.153	18.865	37.018
Total				412.437

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta 2018

C. Kondisi Ekonomi

Kota Yogyakarta tidak terlepas pada sektor pariwisata. Sejauh ini sektor pariwisata merupakan perindustrian kota Yogyakarta yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi bagi Kota Yogyakarta. Selain sektor pariwisata Kota Yogyakarta juga mengandalkan sektor perdagangan, perhotelan, komunikasi, restoran, dan jasa. Beberapa sektor tersebut telah memberikan kontribusi terhadap PDRB sebanyak 78,6% bagi seluruh perekonomian masyarakat Kota Yogyakarta.

D. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terdiri atas anggota partai politik yang terpilih dari hasil pemilihan umum Tahun 2014. Adapun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta saat ini berjumlah 40 orang dengan 10 orang diantaranya adalah perempuan.

Tabel 2.3
Jumlah Kursi Anggota DPRD Kota Yogyakarta
Periode 2014-2019

No	Nama Fraksi	Jenis kelamin		Jumlah Kursi
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Fraksi PDIP	14	1	15
2	Fraksi Demokrat	1	0	1
3	Fraksi PAN	4	1	5
4	Fraksi PKS	4	0	4
5	Fraksi Nasdem	1	0	1
6	Fraksi Golkar	3	2	5
7	Fraksi PPP	3	1	4
8	Fraksi Gerindra	0	5	5
Kota Yogyakarta		30	10	40

Sumber: Sekertariat DPRD Kota Yogyakarta, Badan Pusat Statistik 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah presentase anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta periode 2014-2019 laki-laki sebesar 75% sedangkan perempuan sebesar 25%. Dapat disimpulkan bahwa kuota 30% bagi anggota dewan perempuan belum terpenuhi.

1. Fraksi DPRD Kota Yogyakarta

Adapun susunan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta berdasarkan fraksi sebagai berikut :

Tabel 2.4
Susunan Keanggotaan DPRD Kota Yogyakarta
Periode 2014-2019

No.	Nama	Jabatan	Komisi	Fraksi	Ket
1.	Sujanarko, Se.	Ketua DPRD Badan Anggaran Badan Musyawarah	-	PDIP	L
2.	M.Ali Fahmi, Se, Mm	Wakil Ketua DPRD Badan Anggaran Badan Musyawarah	-	PAN	L
3.	Ririk Banowati Permanasari, Sh.	Wakil Ketua DPRD Badan Anggaran Badan Musyawarah	-	Gerindra	P
4.	Mugiyono Pujo Kusumo	Anggota Dewan Badan Musyawarah	D	PDIP	L
5.	Sigit Wicaksono, S.Kom	Anggota Dewan	A	PDIP	L
6.	Y.Kelik Mulyono, S.Jp	Anggota Dewan Badan Musyawarah	A	PDIP	L
7.	Tatang Setiawan, Sh	Anggota Dewan Badan Anggaran Badan Legislasi	A	PDIP	L
8.	Febri Agung Herlambang	Anggota Dewan Badan Musyawarah	C	PDIP	L
9.	Suryani, Se., M.Si.	Anggota Badan Legislasi	D	PDIP	P
10..	Suharyanto	Anggota Dewan Badan Anggaran	B	PDIP	L
11.	Gm. Deddy Jati S.	Anggota Dewan	B	PDIP	L

		Badan Anggaran			
12.	H. Danang Rudiantmoko	Anggota Dewan Badan Musyawarah	B	PDIP	L
13.	Emanuel Ardi Prasetya	Anggota Dewan Badan Anggaran Badan Legislasi	C	PDIP	L
14.	A. Fokki Ardiyanto, S.Ip	Anggota Dewan Badan Musyawarah Badan Legislasi	D	PDIP	L
15.	Drs. Alb. Y.Sudarma	Anggota Dewan Badan Musyawarah	B	PDIP	L
16.	Suwarto	Anggota Dewan	C	PDIP	L
17.	Dwi Saryono	Anggota Dewan Badan Anggaran	D	PDIP	L
18.	A. Suhartono	Anggota Dewan	C	PDIP	L
19.	Agung Damar Kusumandaru, Se	Anggota Dewan Badan Anggaran	D	PAN	L
20.	Hm. Furhan, Se	Anggota Dewan Badan Anggaran Badan Musyawarah	C	PAN	L
21.	Rifki Listianto, S.Si	Anggota Dewan Badan Anggaran Badan Legislasi	B	PAN	L
22.	Estri Utami, Se	Anggota Dewan Badan Legislasi Badan Kehormatan	A	PAN	P
23.	Bambang Seno Baskoro, St	Anggota Dewan Badan Anggaran Badan Musyawarah	C	Golkar	L
24.	H. Sugiyanto Saputro, Ba	Anggota Dewan Badan Kehormatan	B	Golkar	L
25.	Dra. Sri Retnowati	Anggota Dewan Badan Anggaran Badan Musyawarah	B	Golkar	P
26.	R. Ay. F. Diani Anindhitiati, S.Sos, Mm	Anggota Badan Legislasi	D	Golkar	P
27.	Agusnur, Sh., S.Ip	Anggota Dewan Badan Anggaran	A	Golkar	L
28.	Syamsul Hadi, Se	Anggota Dewan	D	PKS	L
29.	Nasrul Khoiri, S.Far.Apt	Anggota Dewan Badan Anggaran Badan Musyawarah	B	PKS	L
30.	Dwi Budi Utomo	Anggota Dewan Badan Anggaran	D	PKS	L

		Badan Musyawarah			
31.	M. Fauzan, St	Anggota Dewan Badan Musyawarah	C	PKS	L
32.	Bambang Anjar Jalumurti, S.Pi	Anggota Dewan Badan Musyawarah Badan Legislasi	A	PKS	L
33.	Andri Kusumawati, Se.	Anggota Dewan Badan Kehormatan	A	Gerindra	P
34.	Novia Allisa Semendawai, Sh.	Anggota Dewan Badan Anggaran Badan Musyawarah	B	Gerindra	P
35.	Dhian Novitasari, S.Pd	Anggota Dewan	D	Gerindra	P
36.	Christiana Agustiani	Anggota Dewan Badan Anggaran Badan Musyawarah	C	Gerindra	P
37.	M. Hasan Widagdo W	Anggota Badan Anggaran	C	PPP	L
38.	Hm. Fauzi Noor Afshochi	Anggota Dewan Badan Kehormatan Badan Musyawarah	D	PPP	L
39.	Sila Rita, Sh, Mh	Anggota Dewan Badan Musyawarah Badan Legislasi	A	PPP	P
40.	Supriyanto Untung	Anggota Dewan Badan Anggaran	B	PPP	L

2. Anggota Dewan Perempuan Di DPRD Kota Yogyakarta

Sejauh ini Kota Yogyakarta memiliki 10 anggota dewan yang berarti 25% keanggotaan dewan diisi oleh perempuan. Adapun 10 anggota dewan tersebut meliputi :

a. Nama : Suryani, SE., M.Si.

Alamat : Kemetiran Kidul GT II/771, RW/RT 62/18,
Yogyakarta
Tempat tgl lahir : Magelang , 02 Agustus 1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pend. Terakhir :
Dapil : Yogyakarta 3

Fraksi : Fraksi PDIP
Komisi : Komisi D

b. Nama : Estri Utami, SE

Alamat : Bausasran DN 3/619, 031/009, Bausasran,
Danurejan, Yogyakarta
Tempat tgl lahir : Manokwari, 18 Januari 1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pend. Terakhir :
Dapil : Yogyakarta 4
Fraksi : Fraksi PAN
Komisi : Komisi A
Jabatan : Anggota Dewan
Badan Legislasi
Badan Kehormatan

c. Nama : Dra. Sri Retnowati

Alamat : Klitren KG II/655, RT 036/008, Prenggan,
Yogyakarta
Tempat tgl lahir : Salatiga, 01 Maret 1959
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pend. Terakhir :
Dapil : Yogyakarta 5
Fraksi : Fraksi Partai Golkar
Komisi : Komisi B
Jabatan : Anggota Dewan
Badan Anggaran
Badan Musyawarah

d. Nama : R. Ay. F. Diani Anindhitiati, S.Sos, MM

Alamat : Jl. Ngorojo No.1, Gowok RT 03/02,
Caturtunggal, Depok, Sleman
Tempat tgl lahir : Yogyakarta, 12 Juli 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Pend. Terakhir :

Dapil : Yogyakarta 2
Fraksi : Fraksi Partai Golkar
Komisi : Komisi D
Jabatan : Anggota Dewan
Badan Legislasi

e. Nama : Ririk Banowati Permanasari, SH.

Alamat : Jl Mayang No.62/17, RT/RW 028/008, Baciro,
GK, Yogyakarta
Tempat tgl lahir : Bandarlampung, 14 November 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendid. Terakhir : S-1
Dapil : Kota Yogyakarta 4
Fraksi : Fraksi Gerindra
Komisi :
Jabatan : Wakil Ketua DPRD
Badan Anggaran
Badan Musyawarah

f. Nama : Andri Kusumawati, SE.

Alamat : Kalangan UH 5/733 A, 017/004, Pandeyan, UH,
Yogyakarta
Tempat tgl lahir : Blitar, 12 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendid. Terakhir :
Dapil :
Fraksi : Fraksi Gerindra
Komisi : Komisi A
Jabatan : Anggota Dewan

Badan Kehormatan

g. Nama : Dhian Novitasari, S.Pd

Alamat : Terban GK V/653, RT 21 RW 05, Yogyakarta
Tempat tgl lahir : Yogyakarta , 1985-11-06

Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Pend. Terakhir :
Dapil :
Fraksi : Fraksi Gerindra
Komisi : Komisi D
Jabatan : Anggota Dewan
Badan Legislasi

h. Nama : Christiana Agustiani

Alamat : Badran JT I/933, 038/009, Bumijo, Jetis,
Yogyakarta
Tempat tgl lahir : Palu , 1980-08-26
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katholik
Pend. Terakhir :
Dapil :
Fraksi : Fraksi Gerindra
Komisi : Komisi C
Jabatan : Anggota Dewan
Badan Anggaran
Badan Musyawarah

i. Nama : Sila Rita, SH, MH

Alamat : Perum Pelemsewu Baru Blok M 4,
010/Panggunharjo, Sewon, Bantul
Tempat tgl lahir : Madiun , 1971-03-02
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pend. Terakhir :
Dapil : Yogyakarta 1
Fraksi : Fraksi PPP
Komisi : Komisi A

j. NAMA : Novi Allisa Semendawai, SH

Alamat : Jl. Sidokabul 74 RT 024/RW 007, Sorosutan,
Yogyakarta

Tempat tgl lahir	Yogyakarta , 1974-06-14
Jenis Kelamin	Perempuan
Agama Pend. Terakhir	Islam
Dapil	
Fraksi	Fraksi Gerindra
Komisi	Komisi B
Jabatan	Anggota Dewan Badan Anggaran Badan Musyawarah

a. Fungsi DPRD Kota Yogyakarta

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta memiliki tiga fungsi utama yaitu :

1. Fungsi Legislasi

Fungsi Legislasi adalah fungsi utama anggota Dewan dalam mengakomodasi kepentingan publik maupun pihak-pihak terkait (*stakeholders*) yang kemudian diintegrasikan dalam bentuk kebijakan guna meningkatkan pembangunan daerah. Fungsi ini memiliki tujuan yang sangat penting diantaranya:

- 1.1 Sebagai tonggak dalam menentukan arah pembangunan daerah,
- 1.2 Merupakan dasar dalam pembuatan kebijakan publik dalam daerah,
- 1.3 Salah satu dari kontrak sosial di daerah,
- 1.4 Sebagai pendukung dalam pembuatan perangkat daerah beserta susunan organisasi dari perangkat daerah tersebut.

2. Fungsi Anggaran

Fungsi Anggaran adalah peranan Dewan dalam menyusun sekaligus menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah. Peran DPRD sebagai lembaga legitimator harus senantiasa aktif serta proaktif dalam mengelola APBD. Adapun peranan DPRD dalam hal anggaran meliputi;

- 2.1 DPRD turut dalam fungsi pengalokasian, pendistribusian, dan satabilitasi anggaran sebagai bentuk dari kebijakan fiskal adanya APBD,
- 2.2 APBD merupakan investasi yang dimiliki daerah,
- 2.3 APBD merupakan fungsi manajemen Pemerintah Daerah yaitu fungsi dalam perencanaan, otoritas, dan pengawasan.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah salah satu peran dalam memajemen kinerja pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan kebijakan serta rencana yang telah ditetapkan. Hal tersebut bertujuan agar kinerja senantiasa berjalan pada arah yang semestinya serta lebih efektif dan efesien. Fungsi ini sangat baik bagi Pemerintah Daerah agar berjalan pada koridor yang semestinya, adapun tujuan dari pengawasan tersebut meliputi;

- 3.1 Memastikan bahwa Pemerintah daerah senantiasa berjalan sesuai koridor dan rencana kerja,

- 3.2 Memastikan segala kemungkinan terjadinya tindakan koreksi secara tepat dan cepat apabila ditemukan bentuk penyelewengan anggaran yang ditemukan,
- 3.3 Meningkatkan motivasi kerja serta mengurangi tindak penyimpangan, perbaikan, pengurangan, dan peniadaan.
- 3.4 Memastikan kinerja Pemerintah Daerah sedang ataupun telah mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

b. Alat Kelengkapan

1. Pimpinan

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tugas sebagai berikut :

- 1.1 Memimpin jalan rapat atau sidang DPRD sekaligus menyimpulkan hasil sidang untuk dibuat keputusan.
- 1.2 Menyusun rencana kerja secara berkala sekaligus membagi beban kerja dengan wakil ketua.
- 1.3 Melakukan koordinasi dengan anggota dewan lainnya dalam upaya mengsinergikan kinerja dari setiap alat kelengkapan Dewan.
- 1.4 Menjadi juru bicara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 1.5 Turut melaksanakan sekaligus memusyawarahkan setiap kebijakan atau keputusan Dewan.
- 1.6 Sebagai wakil dalam berhubungan baik itu pada lembaga atau instansi lainnya.

1.7 Giat melaksanakan konsultasi dengan Kepala Daerah ataupun pimpinan dari setiap instansi atau lembaga sesuai keputusan Dewan.

1.8 Sebagai wakil dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam persidangan.

1.9 Melaksanakan kebijakan terkait keputusan bersama baik itu sanksi ataupun rehabilitasi anggota sesuai ketentuan peraturan.

1.10 Menyusun rancangan anggaran DPRD dengan sekretariat DPRD yang nantiya disahkan pada rapat aripurna.

1.11 Menyampaikan laporan kinerja pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Adapun pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pimpinan Dprd Kota Yogyakarta Periode 2014-2019

No.	Nama	Jabatan	Komisi	Fraksi	Ket
1.	Sujanarko, Se.	Ketua DPRD	-	PDIP	L
2.	M.Ali Fahmi, Se, Mm	Wakil Ketua DPRD	-	PAN	L
3.	Ririk Banowati Permanasari, Sh.	Wakil Ketua DPRD	-	Gerindra	P

Sumber : Website DPRD Kota Yogyakarta

Berdasarkan Tabel di atas perlu di lihat bahwa salah satu pimpinan dewan dijabat oleh seorang perempuan yang berasal dari Partai Gerinda. Partai Gerinda merupakan partai yang memiliki anggota dewan terbanyak sekaligus semua kursi diisi oleh perempuan.